

TINGKAT KINERJA KONSELOR PROFESIONAL

Abdul Murad

Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Karya Bakti No.36 Medan 20143
e-mail: abdulmurad18@yahoo.com

Abstract: The Performance Level of Professional Counselors. The study was aimed at describing the performance level of professional counselors with regard to educational background and school climate. Analytic-descriptive method was applied in the study. The sample of the study consisted of 64 state senior high school counselors in Bandung, Malang, and Padang. The data were collected using a questionnaire, which were finally analyzed descriptively. The results of this study indicated that the counselors who had the counseling education background were at a high level of performance and those who did not have the counseling education background were at the medium level of performance. Those who worked in the supportive school climate were at high level of performance and those who worked in the less supportive school climate were at the medium level of performance.

Abstrak: Tingkat Kinerja Konselor Profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kinerja konselor profesional ditelaah dari latar belakang pendidikan dan iklim sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Sampel penelitian terdiri dari 64 konselor SMAN di kota Bandung, Malang, dan Padang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, yang akhirnya dianalisis secara deskriptif. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja konselor yang berlatar belakang pendidikan konseling berada pada kategori tinggi. Sebaliknya, tingkat kinerja konselor yang bukan berlatar belakang pendidikan konseling berada pada kategori sedang. Tingkat kinerja konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang suportif berada pada kategori tinggi dan tingkat kinerja konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang kurang suportif berada pada kategori sedang.

Kata Kunci: konselor profesional, kinerja konselor, latar pendidikan, iklim sekolah

Penelitian ini diawali dari ketidakpuasan pengguna layanan konseling terhadap kinerja konselor dan guru pembimbing di sekolah. Penelitian terdahulu umumnya mendukung fenomena tersebut dengan menemukan fakta, sebagian orang tua (38%) belum mengakui signifikansi dan eksistensi program Bimbingan Konseling (BK) karena alasan kurang profesionalnya para guru pembimbing dalam menjalankan tugas (Supriadi, 1990). Melalui studi pendahuluan terhadap guru pembimbing di SMAN di Medan ditemukan sejumlah guru pembimbing yang menunjukkan perilaku kurang profesional dan bukan berlatar pendidikan konselor, melainkan guru bidang studi yang disertai tanggung jawab menyelenggarakan BK. Banyak petugas berlatar belakang pendidikan sarjana muda maupun sarjana yang berkeahlian bukan BK. Perbandingan jumlah konselor dan siswa belum rasional, program kerja BK bersifat insidental; pengakuan dan keterlibatan masyarakat terhadap BK belum cukup; belum terampil melakukan konseling, tes serta non-tes.

Pelaksanaan konseling oleh guru pembimbing belum sesuai dengan yang diharapkan, yakni masih kurangnya kemampuan pembimbing dalam menangani dan menggali masalah yang dihadapi siswa.

Kondisi di atas secara umum dikontribusi aspek-aspek penentu profesionalisme konselor, yaitu aspek *pre-service training*, organisasi profesi, komitmen individual, *in-service training*, seperti adanya PKG/ Musyawarah Guru Bimbingan Penyuluhan (MGBP), regulasi, supervisi konselor dan pendekatan kolaboratif yang dipandang memberi urunan bagi tingginya kinerja profesionalisme konselor. Ditinjau dari aspek *pre-service training*, tindakan dan tujuan profesionalisasi hendaknya dimulai dari penyeleksian maupun perekrutan calon konselor berdasarkan kompetensi, sumber daya, kurikulum, praktikum, tuntutan praktik kerja lapangan yang tersupervisi. Jika aspek-aspek di atas diselenggarakan sesuai dengan standar pendidikan konselor ideal maka kesiapan calon konselor memasuki lapangan tugas akan semakin tinggi. Demikian

pula organisasi profesi konseling, dalam hal ini Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN) seyogyanya membina dan mengendalikan tiap anggotanya agar mampu memberikan layanan yang memenuhi standar profesional bimbingan dalam rangka menyejahterakan klien. Dari aspek *in-service training*, komitmen konselor untuk terus mengembangkan kemampuan dirinya dalam bekerja sangat dibutuhkan. Konselor yang memiliki komitmen ini sanggup memberi pengorbanan yang besar semata-mata untuk membantu klien. Dengan komitmen ini konselor terus menyegarkan, memperkaya, dan memperbaharui berbagai keterampilannya untuk menangani tuntutan perubahan cepat yang terjadi dalam kehidupan siswa.

Latar pendidikan konselor merupakan variabel yang memberikan urunan berarti munculnya kondisi-kondisi di atas untuk menghasilkan konselor profesional secara maksimal. Latar pendidikan dalam penelitian ini dimaksudkan konselor yang berlatar pendidikan BK S1 sehingga dengan kompetensi yang dimilikinya diharapkan kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan di atas dapat dikurangi atau diatasi. Kenyataannya masih banyak konselor yang tidak berlatar pendidikan BK, ditambah masih banyak ditemukan masalah klien terbengkalai. Sebanyak 34,58% siswa SMA di Sergai pengonsumsi rokok aktif (Waspada, 11 Juni 2010). Sebanyak 73,4% pengguna narkoba di Sumatera Utara adalah usia sekolah (Analisa, 3 April 2005). Dilihat dari pendidikan konselor, terdapat pula sinyalemen bahwa konselor yang dihasilkan belum langsung mampu mengunjujkerjakan layanan BK yang berkualitas. Tentu ini masalah yang saling terkait dapat diungkap secara lebih spesifik. Profesi konselor belum memiliki sistem profesionalisme yang menjamin keberlanjutan sejak mengawali pendidikan konselor hingga memasuki wilayah tugas konselor.

Iklm sekolah juga memberi urunan berarti bagi kinerja konselor profesional. Tanpa iklim sekolah yang mendukung tidak mungkin kinerja konselor meningkat. Kepala sekolah belum mendukung BK sepenuhnya. Ini ditandai dengan masih minimnya pemenuhan kebutuhan sarana, fasilitas, dan alat kerja konselor. Kurangnya supervisi dan motivasi dari kepala sekolah terhadap konselor untuk mengembangkan program BK di sekolah. Ditambah lagi manajemen sekolah lebih memilih langkah mudah dan murah dengan merekrut guru bidang studi yang berminat dengan BK yang ada di sekolahnya, tetapi bukan konselor yang berlatar pendidikan BK. Jika kondisi ini tidak segera diubah maka masalah-masalah yang diakibatkannya akan berkomplikasi pada rendahnya pencapaian nilai akademis siswa atau sekolah.

Kompetensi konselor profesional sangat dibutuhkan untuk mencegah, memecahkan masalah siswa.

Terdapat karakteristik konselor yang berhubungan sebab akibat dengan kinerja superior dalam dimensi kompetensi konselor profesional. Karakteristik konselor ini pula yang membedakan kualifikasi masing-masing. Hasil penelitian Muri (1995) menemukan bahwa petugas bimbingan berdasarkan latar belakang pendidikan digolongkan sebagai guru pembimbing, pembimbing muda, dan pembimbing (konselor). Penggolongan ini didasarkan atas penguasaan kompetensi. Kompetensi ini dihasilkan untuk menangani perkembangan individu yang bergerak dari *what it is* menuju *what should be* (Kartadinata; 2005: 6).

Tingkat kinerja aktual konselor profesional adalah taraf yang dicapai konselor dalam menampilkan atau mengunjujkerjakan ke-15 kompetensi konselor profesional di sekolah. Tingkat penguasaan ke-15 dimensi membedakan profesionalitas konselor satu dengan konselor yang lainnya. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empirik tentang tingkat kinerja aktual konselor profesional yang ditelaah dari latar pendidikan, iklim sekolah/penyelenggaraan BK.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan saat ini. Subjek penelitian dipilih dari para konselor SMAN di kota Bandung, Malang, dan Padang (dua SMAN yang tergolong memadai pelaksanaan program bimbingannya dan dua SMAN yang tergolong kurang memadai pelaksanaan program bimbingan dari tiga kota tersebut). Dengan demikian, terdapat 12 SMAN dari keseluruhan tiga kota tersebut, yang konselornya berjumlah 64 orang, terdiri atas 36 konselor dari sekolah yang baik pelaksanaan program BK-nya dan 28 orang konselor dari sekolah yang pelaksanaan program BK-nya belum memadai. Konselor berlatar pendidikan BK sebanyak 40 orang (62,50%), yang bukan BK sebanyak 24 orang (37,5%). 64 konselor ini menjadi responden penelitian. Sumber data penelitian adalah kinerja kompetensi konselor profesional.

Untuk memperoleh data yang akurat, instrumen kinerja konselor profesional diujicobakan pada sekolah yang sejenis di lingkungan kota yang sama. Uji coba instrumen menghasilkan koefisien validitas konstruk. Jika jumlah butir yang signifikan belum mencukupi jumlah yang diharapkan, butir-butir yang mendekati signifikan digunakan sehingga instrumen siap digunakan untuk mendapatkan data.

Data kuantitatif yang didapatkan adalah berupa skor jawaban dari responden terhadap angket, baik secara per butir maupun secara keseluruhan butir.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program *SPSS versi 11.5*. Keluaran dari program ini tidak hanya memberikan informasi tentang koefisien korelasi antara butir dan total, tetapi juga koefisien korelasi *Alpha Cronbach* untuk menghitung reliabilitas suatu alat ukur yang menggunakan pendekatan konsistensi internal. Kuesioner yang valid dan reliabel telah menjangkau data yang diperlukan untuk dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif. Teknik analisis ini bertujuan meringkas data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti, yakni melalui perhitungan persentase skor aktual dari skor ideal. Data yang dianalisis adalah data kinerja nyata dalam mengunjukkan kompetensi konselor profesional yang terdiri atas 15 dimensi kompetensi konselor. Tingkat kinerja konselor dalam penguasaan ke-15 dimensi kompetensi konselor diperoleh melalui konversi skor data dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan kriteria berikut: lebih kecil daripada 60% (rendah), 60%-69% (sedang), 70%-79% (tinggi), dan 80%-100% (sangat tinggi). Empat rentang ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan responden menjawab secara kompromis atau sedang.

Informasi tentang baik/memadai, kurang memadai penyelenggaraan program BK ini didapatkan dari masing-masing Kantor Dinas Pendidikan setempat berdasarkan kriteria yang ditetapkan lembaga itu. Kriteria yang digunakan adalah *Grade Point Average* (GPA) yang dicapai sekolah, pengadaan fasilitas BK, dan latar pendidikan tenaga bimbingan di sekolah yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, temuan penelitian ini dikategorikan menjadi empat bagian, yaitu kinerja konselor profesional dalam ke-15 dimensi kompetensi, kinerja konselor berdasarkan perbedaan latar pendidikan, kinerja konselor profesional berdasarkan iklim sekolah, dan kinerja konselor profesional berdasarkan latar pendidikan dan iklim sekolah.

Kinerja Konselor Berdasarkan Dimensi Kompetensi

Hasil data persentase kinerja konselor profesional secara keseluruhan maupun bila dilihat dari persentase masing-masing dimensi kompetensi konselor profesional (15 dimensi kompetensi konselor profesional) yang dikembangkan oleh Engels & Dameron (1990: 2-151) dipaparkan berikut ini. Secara holistik, kinerja konselor profesional mencapai sebesar

67,61% (tergolong sedang). Artinya, konselor telah mencapai tingkat kinerja aktual konselor profesional pada taraf cukup memadai dalam menampilkan kompetensi konselor profesional. Pencapaian ini juga berarti bahwa konselor menguasai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan 15 dimensi kompetensi BK pada taraf sedang. Pencapaian kategori sedang ini dimungkinkan karena 46,86% konselor memiliki latar belakang pendidikan BK dan 50% (enam SMAN) jumlah sekolah telah dikategorikan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai sekolah yang penyelenggaraan BK-nya tergolong baik serta 63 dari 64 konselor berpengalaman kerja sebagai konselor berkisar 9 hingga 28 tahun. Hasil penelitian Asrori (1990) menunjukkan bahwa kinerja petugas bimbingan baru 40,63% yang termasuk kategori "tinggi" dan 59,37% termasuk kategori "sedang". Penelitian yang masih sejalan lainnya menemukan bahwa baru 39,47% guru pembimbing yang dapat menerapkan kemampuan profesional konseling dalam kategori "tinggi", sedangkan 60,53% baru mampu menerapkan kemampuan tersebut pada kategori "sedang". Dari jbaran hasil persentase masing-masing penelitian tersebut memberikan makna bahwa kinerja konselor di sekolah pada umumnya masih sama-sama berada pada taraf sedang, yang diuruni oleh latar belakang pendidikan konselor dan iklim organisasi sekolah yang bervariasi.

Sebagai perbandingan dengan substansi teori ke-15 dimensi kompetensi ideal dalam penelitian ini, penelitian Hatip (1989) yang relevan tentang profil konselor SMA menunjukkan ada sembilan belas karakteristik yang diharapkan dimiliki oleh seorang konselor SMA. Kesembilan belas karakteristik disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan sekolah; pengamatan terhadap kompetensi para konselor yang ada selama ini; kebutuhan sekolah akan bimbingan di masa mendatang; kemungkinan ketercapaiannya; pengalaman menyelenggarakan bimbingan; dan kesulitan yang dihadapi konselor SMA. Kesembilan belas karakteristik yang dimiliki seorang konselor SMA adalah kepribadian konselor; kemampuan intelektual; kemampuan mengadakan empatik; menarik; berpandangan positif; memperlihatkan kapasitas untuk menjalin hubungan; bersikap profesional; memiliki wawasan bimbingan; memahami kepribadian manusia; menguasai teori dan praktik; menguasai teknik pemahaman individu; kemampuan untuk memasyarakatkan bimbingan; kemampuan mengadminstrasikan program bimbingan; kemampuan mengelola berbagai layanan; menguasai penyelenggaraan bimbingan karir; mampu menyelenggarakan konsultasi dengan berbagai pihak; menguasai metodologi pene-

litian; menguasai proses belajar mengajar; mampu bekerjasama dengan personil lain. Memang profil kompetensi konselor yang dikembangkan dikonstruksi berdasarkan aliran, teori tertentu atau *expert judgment* yang dianut peneliti. Hasil-hasil penelitian di atas memberi makna bahwa kinerja konselor berkualitas merupakan suatu keniscayaan di tengah beragamnya kualifikasi konselor di sekolah saat ini dan pola pembinaan konselor secara integratif berkelanjutan melalui *pre-service training* maupun *in service training* serta penciptaan iklim sekolah yang suportif bagi BK merupakan jawaban solusi yang tepat dan perlu diselenggarakan secara profesional dan kolaboratif.

Secara spesifik, tingkat kinerja konselor profesional yang tergolong tinggi adalah dimensi ciri kepribadian (CK) sebesar 73,63%. Artinya, para konselor dapat mengunjukkerjakan ciri-ciri kepribadian berupa atribut-atribut atau sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh konselor profesional dengan memuaskan. Berbeda dengan hasil penelitian ini, penelitian Dahlan (1988) menunjukkan hasil yang kurang mengembirakan tentang upaya membina kepribadian dan sikap siswa SPG terhadap jabatan guru SD menunjukkan bahwa masih perlu pola-pola pembinaan yang dilandasi oleh teori-teori BK. Meskipun para konselor telah menunjukkan ciri kepribadian yang memuaskan sebagaimana hasil penelitian ini, namun upaya-upaya *pre-service training* yang ditata secara profesional dan berkelanjutan terkait konselor yang berkepribadian/berkarakter masih tetap dibutuhkan. Kinerja konselor profesional dalam melaksanakan konseling anak dan remaja (KAR) sebesar 71,48%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor juga berhasil dengan memuaskan mengunjukkerjakan konseling bagi pemenuhan kebutuhan perkembangan unik anak dan remaja. Kinerja konselor profesional dalam melaksanakan konseling individual (KI) sebesar 71,06%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor mengunjukkerjakan strategi konseling individual dengan baik yang memberi pengaruh fasilitatif terhadap kepedulian, pengembangan, dan perubahan tingkah laku klien. Kinerja konselor profesional dalam melaksanakan konseling sekolah (KS) sebesar 74,02%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor dapat membangun komunikasi, memperkuat hubungan antara orang tua dan sekolah dengan memuaskan. Kinerja konselor profesional dalam menampilkan kompetensi pengembangan program bimbingan (KPPB) sebesar 71,61%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor dengan memuaskan mengunjukkerjakan keterampilan menyusun program konseling perkembangan yang efektif.

Tingkat kinerja yang tergolong sedang adalah kinerja konselor profesional dalam mengunjukker-

jakan konseling pasangan/pranikah/keluarga (KPPK) sebesar 60,64%, capaian persentase ini berarti konselor mengunjukkerjakan pemahaman terhadap dinamika keluarga dan memperkaya keterampilan orang tua, pola-pola keluarga dan hubungan pasangan dengan taraf sedang. Kinerja konselor profesional dalam melaksanakan konseling kelompok (KK) sebesar 66,41%, capaian persentase ini memberi makna bahwa konselor mengunjukkerjakan kompetensi memahami, mengimplementasikan prinsip-prinsip kerja kelompok dalam setting sekolah berada pada taraf sedang. Kinerja konselor profesional dalam menampilkan kompetensi pengembangan karir klien (KPKK) sebesar 67,93%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor dengan cukup memadai mengunjukkerjakan penguasaan perkembangan manusia, teori perkembangan dan pilihan karir serta memiliki informasi diri klien maupun informasi karir yang lengkap. Kinerja konselor profesional dalam menampilkan kompetensi konsultasi (KKO) sebesar 68,89%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor mengunjukkerjakan kompetensi memahami model konsultasi dan memelihara hubungan kolaboratif di sekolah berada pada taraf sedang. Kinerja konselor dalam menampilkan kompetensi diagnosis, dokumentasi, dan referral (KDDR) sebesar 64,70%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor mengunjukkerjakan kompetensi mendiagnosis, memahami, dan memelihara data klien berdasarkan dukungan asesmen pada taraf sedang. Kinerja konselor profesional dalam menampilkan kompetensi supervisi konselor (KSK) sebesar 62,70%, capaian persentase ini berarti bahwa konselor mengunjukkerjakan kompetensi dalam aspek etik, legal, aturan dan profesi serta metode dalam mengelola kasus klien berada pada taraf sedang.

Tingkat kinerja konselor yang tergolong rendah adalah kompetensi konseling adiksi (KA) sebesar 54,17%. Artinya konselor kurang memuaskan mengunjukkerjakan kompetensi memahami dinamika kebergantungan obat dan mendiagnosis/menyembuhkan klien yang mengalami abuse/adiksi. Tingkat kinerja konselor dalam mengunjukkerjakan kompetensi konseling multikultural dan populasi khusus (KMPK) sebesar 58,20%. Capaian ini berarti bahwa konselor kurang maksimal mengunjukkerjakan kompetensi merespon kebutuhan klien dari populasi spesifik dan multikultural melalui intervensi yang efektif. Tingkat kinerja konselor mengunjukkerjakan kompetensi evaluasi dan riset (KER) sebesar 57,42% berarti bahwa konselor kurang kompeten menerapkan konsep dan praksis riset dan evaluasi untuk kepentingan klien dan kompetensi pengukuran (KP) sebesar 58,2% memberikan makna pula bahwa konselor kurang memahami konsep dasar asesmen yang tepat

dan komprehensif serta implikasinya bagi kepentingan klien. Tingkat kinerja konselor yang tergolong rendah dan sedang tersebut di atas menuntut upaya segera untuk meningkatkan kinerja konselor profesional melalui penataan pendidikan/pelatihan yang intensif dan profesional serta penciptaan iklim organisasi sekolah yang suportif bagi BK. Pendidikan dan pelatihan bersifat remedial dikemas untuk memenuhi kebutuhan dan dimensi kinerja konselor yang masih rendah dan sedang. Sementara kinerja konselor profesional yang sudah tergolong tinggi tetap dipelihara, dipertahankan bagi kepentingan klien di sekolah. Masing-masing dimensi kompetensi konselor profesional secara teoretik dapat diungkap secara terinci berikut ini.

Dimensi CK dapat dirinci atas 12 sub-dimensi. Ke-12 sub-dimensi tersebut adalah *sub-dimensi tanggung jawab kesejahteraan klien* yang terbagi atas lima indikator kinerja, yaitu (a) memverbalisasi komitmen utama, (b) bertindak sesuai minat klien, (c) menyatakan minat yang tulus, peduli secara verbal dan nonverbal, (d) mengutamakan klien, dan (e) merespon perasaan terkait dengan orang yang relevan dalam hidup klien. *Sub-dimensi sensitif* yang terbagi atas 3 indikator kinerja, yaitu (a) menyadari perasaan, pikiran, nilai-nilai, dan sikap klien, (b) mengidentifikasi harapan klien dan orang yang signifikan, (c) tergugah pada pengalaman dan perasaan klien. *Sub-dimensi empatik* dirinci atas 3 indikator kinerja, yaitu (a) menyampaikan persepsi klien terhadap dunianya, (b) merumuskan respon verbal yang akurat dengan merefleksikan isi dan perasaan pesan verbal dan nonverbal klien, (c) menghindari gangguan interaksi dengan klien. *Sub-dimensi individualitas* dirinci atas 6 indikator kinerja, yaitu (a) menerima perbedaan pandangan subjektif klien, (b) bersikap objektif terhadap nilai, pendapat, emosi klien yang berbeda dengan konselor, (c) menghindari terpecahnya nilai-nilai pribadi klien, (d) memberi konseling tanpa prasangka dan stereotip, (e) menyampaikan kebebasan baik verbal maupun nonverbal kepada klien untuk memelihara nilai yang bermanfaat, (f) memfasilitasi kepuasan/harga diri klien dan kebermaknaannya dalam kelompok. *Sub-dimensi potensi klien* dirinci atas 2 indikator kinerja, yaitu (a) menyampaikan persepsi tentang klien yang berharga, (b) menyampaikan harapan-harapan, keyakinan terhadap klien untuk menyelesaikan masalah. *Sub-dimensi konsep perilaku* dirinci atas 3 indikator kinerja, yaitu (a) memodifikasi intervensi berdasar keefektifannya, (b) menerapkan konstruk teoretik untuk memahami spesifikasi masalah manusia, (c) menentukan tujuan konseling dan treatment.

Sub-dimensi komunikasi dirinci atas 4 indikator kinerja, yaitu (a) menyampaikan pesan dengan istilah

yang konkrit, (b) berkomunikasi dengan klien sesuai gaya dan perkembangannya, (c) menunjukkan kesesuaian tingkah laku verbal dan non-verbal, (d) menyesuaikan waktu dengan tujuan konseling. *Sub-dimensi kreatif* dirinci atas 3 indikator kinerja, yaitu (a) menerapkan intervensi spontan yang sesuai dengan teori, (b) memfasilitasi fantasi, khayalan, dan eksplorasi bagi pertumbuhan klien, (c) mengambil resiko. *Sub-dimensi objektif* dirinci atas 2 indikator kinerja, yaitu (a) terlibat secara proporsional dan profesional dengan klien, (b) menunjukkan keterbukaan untuk memfasilitasi respon-respon efektif. *Sub-dimensi disiplin diri* dirinci atas 3 indikator kinerja, yaitu (a) mengelola aset pribadi dengan efektif, (b) berinteraksi dengan orang lain dengan asertif, saling hormat, sadar, dan emosi terkendali, (c) bekerjasama dalam suatu tim. *Sub-dimensi komitmen pada pengembangan dan etik profesional* dirinci atas 8 indikator kinerja, yaitu (a) berpartisipasi dalam pengembangan profesi berkelanjutan, (b) berkontribusi aktif dalam organisasi profesi konseling, (c) menggunakan sumber-sumber masyarakat bagi pertumbuhan klien, (d) mengikuti pendidikan berkelanjutan, (e) memberi dan menerima *feedback* positif/negatif terhadap sistem pertumbuhan profesionalitas, (f) mengutamakan standar etik organisasi, (g) memeriksa etika pribadi untuk mengatasi konflik klien, (h) berperilaku sesuai standar etik organisasi sendiri.

Dimensi KAR dapat dirinci atas tujuh indikator kinerja, yaitu (a) menerapkan teori, teknik konseling perkembangan anak dan remaja, (b) mengidentifikasi perubahan tingkah laku anak, (c) menilai komitmen anak dalam konseling, (d) memfasilitasi komunikasi dengan anak yang sulit berhubungan, (e) bekerja dengan anak yang bermasalah, (f) membantu orang tua untuk menerima perubahan positif pada perkembangan anak, (g) menunjukkan strategi interpersonal paling efektif. Dimensi KK dirinci atas 5 indikator kinerja, yaitu (a) menggunakan metode konseling kelompok, (b) mempraktikkan standar profesional kerja kelompok, (c) memelihara interaksi verbal/nonverbal dalam tahapan kelompok, (d) mengamati interaksi verbal/non-verbal dalam tahapan kelompok, (e) mengimplementasikan berbagai pendekatan kerja kelompok. Dimensi KI dapat dirinci atas tujuh indikator kinerja, yaitu (a) membantu klien mengklarifikasi masalah, sebab, dan solusinya, (b) menggunakan pendekatan konseling yang tepat, (c) menyampaikan tingkat perkembangan, (d) mengonseling klien tentang isu-isu sosial dan pribadi, (e) mengarahkan berbagai masalah perkembangan individu, (f) melakukan referral, (g) memberikan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan klien.

Dimensi KS dapat dirinci atas enam indikator kinerja, yaitu (a) menilai kebutuhan klien, (b) meng-

koordinasikan kurikulum bimbingan perkembangan komprehensif, (c) mengadaptasi model bimbingan sesuai kebutuhan spesifik klien, (d) mengkoordinasi pendekatan tim kolaboratif, (e) membantu siswa merencanakan pendidikan dan karir, (f) menginformasikan tentang program bimbingan perkembangan. Dimensi KA dapat dirinci atas enam indikator kinerja, yaitu (a) menjelaskan fase-fase penyakit sesuai dengan bentuk adiksi, (b) menjelaskan rentang perilaku adiksi, (c) menjelaskan isu yang terkandung dalam kebergantungan psikologis, (d) menjelaskan faktor-faktor genetik, (e) menerapkan teori-teori etiologi ketergantungan, (f) menspesifikasi peran multigenerasi keluarga dalam etiologi adiksi dan *abuse* obat. Dimensi KPPK dapat pula dirinci atas tiga indikator kinerja, yaitu (a) menganalisis pola-pola interaksi verbal/non-verbal dalam sistem, (b) menyesuaikan teori konseling dengan konseling hubungan, pasangan, keluarga, (c) mengonsep keluarga/pasangan sebagai suatu sistem serta merespon keragaman budayanya dengan tepat. Dimensi KMPK dirinci atas empat indikator kinerja, yaitu (a) memelihara keakraban dengan isu budaya yang relevan, konsep, dan sistem nilai, (b) mengusahakan pendekatan keragaman budaya dan sosial yang cocok dengan klien, (c) mengadopsi keterampilan intervensi sesuai dengan keragaman kebutuhan spesifik klien, (d) mengembangkan program untuk kebutuhan khusus.

Dimensi KPPB dirinci atas enam indikator kinerja, yaitu (a) mengidentifikasi visi, misi, dan harapan lembaga, (b) menggunakan data yang dikompilasi dari kebutuhan dalam merencanakan program konseling, (c) mengimplementasi strategi khusus untuk pencapaian kompetensi klien, (d) mendesain, mengimplementasi, memonitor, dan mengevaluasi, merevisi program konseling bagi sistem klien, (e) mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan fasilitas fisik layanan, (f) menginventarisasi, menggunakan data dari sumber-sumber yang relevan dalam mengembangkan program konseling komprehensif. Dimensi KPKK dirinci atas 19 indikator kinerja, yaitu (a) menjelaskan interelasi karir dengan keseimbangan peran hidup, (b) mengintegrasikan teori konseling karir ke dalam suatu pendekatan komprehensif, (c) menjelaskan pengaruh teknologi dan perubahan terhadap perkembangan karir, (d) memperkaya kesadaran diri klien melalui penilaian diri, informasi karir yang tepat, (e) membantu klien mengidentifikasi, memahami bakat, kecakapan pemecahan masalah, minat, strategi penyusunan tujuan karir, (f) membimbing klien menggunakan multimedia untuk informasi pendidikan dan karir, (g) mengembangkan program dan melibatkan orang tua terkait perkembangan anak, (h) mengelola, menafsirkan alat-alat asesmen

diri untuk membantu klien membuat keputusan pendidikan dan karir, (i) membantu klien mengembangkan keterampilan menafsirkan informasi karir, (j) bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk magang. Dimensi KKO dirinci atas 7 indikator kinerja, yaitu (a) mengkomunikasikan empati, penghargaan, persepsi positif, ketulusan, kerelaan, serta mengembangkan komunikasi interpersonal untuk membangun hubungan konsultasi yang efektif, (b) menggunakan berbagai model konsultasi, (c) menyampaikan harapan yang jelas tentang hubungan konsultasi dengan perubahan perilaku yang diharapkan, (d) membimbing, memfasilitasi asumsi keluarga terhadap tanggung jawab pemecahan masalah, (e) memberikan pendekatan multidimensional, (f) berkonsultasi dengan personil terkait sistem kehidupan klien, (g) berpartisipasi dalam pertemuan tim multidimensional dan mampu membuat referral yang tepat.

Dimensi KDDR dirinci atas 12 indikator kinerja, yaitu (a) menyimpan dan mengembangkan bahan-bahan untuk praktik konseling, (b) memelihara kerahasiaan data klinis klien, (c) mengelola pengukuran diagnostik lebih lanjut, (d) mengumpulkan data yang tepat, (e) menjelaskan keterbatasan lebih awal tentang bentuk referral, (f) membantu melalui layanan lain untuk menindaklanjuti saran sumber referral, (g) menjelaskan kebutuhan khas klien yang direferal, (h) memberi sumber referral tentang prosedur, kebijakan, data sah dari lembaga, (i) menunjukkan manfaat maupun hambatan referral, (j) membantu klien saat dan setelah referral, (k) menetapkan prosedur untuk mengalihkan informasi pada dan dari sumber referral, (l) membantu orang tua, guru, staf, dan klien dalam membuat kontak awal. Dimensi KSK dirinci atas 6 indikator kinerja, yaitu (a) menyampaikan kode etik, (b) menggunakan intervensi supervisi yang tepat, (c) menyepakati latihan supervisi, (d) mengklarifikasi gaya supervisi supervisor kepada konselor, (e) memberi dukungan, tantangan seimbang, (f) mengelola tes dalam konseling. Dimensi KER dirinci atas 7 indikator kinerja, yaitu (a) menjelaskan karakteristik dasar alat pengumpul data, (b) mengemukakan kelemahan dan kekuatan alat/teknik riset, (c) menjelaskan penerapan khusus teknik dan alat riset, (d) mengevaluasi alat, teknik riset, (e) mengkonstruksi instrumen, (f) menerapkan desain penelitian sesuai dengan masalah dan situasi konseling, (g) menggunakan riset yang tepat. Dimensi KP dirinci atas 5 indikator kinerja, yaitu (a) menerapkan statistika deskriptif, (b) menafsirkan asesmen dengan tepat, (c) menerapkan teknologi yang tepat dalam asesmen, (d) memilih instrumen yang tepat, (e) menerapkan asesmen yang benar.

Pencapaian dimensi CK, KAR, KI, KS, KPPB yang tergolong tinggi dapat dipahami karena memang

kelima dimensi tersebut seringkali diunjukkerjakan dan diselenggarakan oleh konselor selama masa kerjanya yang cukup lama di SMAN-SMAN dari 10 hingga 28 tahun, sementara dimensi-dimensi KK, KPKK, KKo, KDDR, KSK, KPPK dan KA, KMPK, KER, dan KP yang berada pada kategori cukup dan rendah diperkirakan hanya dilakukan oleh konselor di sebagian kecil SMAN, sebagian besar konselor di SMAN lainnya masih jarang menyelenggarakan layanan dimensi tersebut. Meskipun konselor terakhir ini mungkin mulanya menguasai secara kognitif ke-10 dimensi tersebut di atas yang diperoleh melalui pendidikan *pre-service training* BK, belakangan kinerja ke-10 dimensi tersebut tidak muncul atau kurang ditampilkan. Kurang ditampilkannya 10 kinerja dimensi tersebut diuruni oleh kondisi penyelenggaraan BK di SMAN yang kurang suportif. Terkait 15 dimensi di atas, Bowers dan Hatch (2002) memandang pentingnya standar berupa deskripsi tentang apa yang seharusnya diketahui dan dilakukan oleh konselor pada taraf ekspektasi paling tinggi.

Tingkat kinerja konselor dalam mengunjukkerjakan seluruh dimensi berarti jumlah nilai masing-masing kinerja dimensi. Masing-masing dimensi diunjukkerjakan dengan mengunjukkerjakan jumlah dan kualitas indikator yang dicakupnya, misalnya kinerja konselor dalam dimensi CK didapatkan dari jumlah nilai sub-dimensi-sub-dimensi tanggung jawab, sensitif, empatik, individualitas, potensi klien, konsep perilaku, komunikasi, kreatif, objektif, disiplin diri, komitmen pada pengembangan dan etik profesional. Lingkup sub-dimensi mengandung sejumlah indikator yang diunjukkerjakan berbeda seorang konselor dengan konselor lainnya. Sehingga terjadi variasi kinerja konselor dalam mengunjukkerjakan ke-15 dimensi konselor profesional.

Informasi ini didapatkan melalui wawancara peneliti langsung dengan responden konselor ditemukan bahwa semua konselor berlatar pendidikan BK telah bertugas sebagai konselor selama berkisar antara 10-28 tahun pada saat penelitian dilakukan. Ini mengandung arti pula bahwa tingkat kinerja dimensi kompetensi yang tergolong tinggi dicapai melalui pengalaman kerja konselor yang lama. Konselor belajar dengan sungguh-sungguh dan memaknai pengalaman profesi konseling dalam rentang waktu tersebut di SMAN. Tingkat kinerja konselor profesional dalam mengunjukkerjakan dimensi CK, KAR, KI, KS, KPPB yang tergolong tinggi pada rata-ratanya mencapai sebesar 72,36% (tinggi). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dimensi-dimensi ini sudah kerap dilakukan di SMAN, hampir semua konselor SMAN memiliki karakteristik kepribadian yang mendukung kemampuan membantunya bagi kesejah-

teraan klien. Tidak saja konselor yang berlatar pendidikan BK (40 orang), konselor yang bukan berlatar pendidikan BK (sebanyak 24 orang) sebagian besar sangat menyenangkan bekerja membantu para siswa. Dalam proses membantu siswa, konselor telah mengunjukkerjakan, memodelkan pribadinya dengan baik menampilkan ciri-ciri pribadi bertanggung jawab bagi kesejahteraan klien, peka, empatik, menghargai individualitas klien, komunikatif, kreatif, objektif, disiplin diri, komit dalam pengembangan keprofesiannya.

Pencapaian lima dimensi pada kategori tinggi (72,36%) memberikan implikasi pula bahwa apabila konselor ingin mencapai kinerja konselor profesional pada tingkat tinggi batas maksimal, sangat tinggi, masih diperlukan pendidikan akademik/profesi yang bersifat remedial. Sedangkan empat dimensi konselor profesional (KA, KMPK, KER, KP) diunjukkerjakan konselor berada pada tingkat rendah. Pencapaian ke-4 dimensi pada tingkat rendah ini disebabkan oleh masih besarnya jumlah konselor yang bukan berlatar pendidikan BK (sebanyak 25 orang (41,7%)), dan sebanyak 24 (37,5%) orang bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraan BK-nya kurang memadai. Ini mengandung arti bahwa para konselor memiliki kompetensi dalam keseluruhan empat dimensi kinerja konselor di atas, akan tetapi pencapaian ini mengisyaratkan perlunya memperbaiki kinerja aktual konselor melalui eksplorasi solusi terhadap faktor penyebab kinerja rendah. Secara lebih cermat, dari ke empat dimensi kinerja konselor profesional yang ditampilkan pada tingkat rendah ini, dua dimensi kompetensi merupakan kompetensi inti (KER dan KP). Lingkungan konselor di sekolah dan lingkup tugas yang dilakukan di sekolah setiap hari kurang menantang atau jarang mengembangkan kompetensi dimensi evaluasi dan riset, pengukuran, dan supervisi konselor. Demikian pula terhadap tiga dimensi lainnya dalam tingkat rendah, di samping konselor kurang ditantang atau dihadapkan dengan masalah adiksi, pasangan/perkawinan/keluarga, multikultural dan populasi khusus, tugas perkembangan siswa belum pada tahap membicarakan tentang perkawinan dan keluarga. Tentang pasangan saja masih dipandang tabu untuk dibicarakan dengan para konselor di sekolahnya. Masalah adiksi sebagai masalah gunung es. Artinya, jika masalah ini diungkapkan di sekolah akan dipecah dan dianggap kriminal menjadi urusan polisi. Lingkungan kultural sekolah lebih bersifat homogen, sehingga kompetensi/dimensi KMPK belum sesungguhnya teruji.

Kinerja konselor profesional dalam menampilkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam konseling perkembangan anak/remaja tergolong baik. Mereka pada umumnya menguasai pendekatan dan

karakteristik perkembangan remaja yang sangat efektif untuk membangun hubungan interpersonal dengan remaja. Penguasaan ini dimiliki konselor tentu diperoleh dari pendidikan *pre-service training* BK yang hampir tersebar rata pada setiap SMAN. Lebih-lebih lagi para konselor menyukai bekerja dengan siswa. Semua responden konselor yang bertugas di 12 SMAN telah merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi program BK komprehensif dengan baik. Mereka mengembangkan program BK komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan keunikan permasalahan siswa dan sekolah masing-masing. Di dalam mengimplementasikan program BK, mereka mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menggunakan data yang valid dan *up to date*. Baik data siswa maupun data terkait dengan sistem di sekolah terdokumentasi dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Di sekolah, konselor profesional juga mengunjukkerjakan konseling dalam menangani masalah belajar, pribadi, sosial, dan lanjutan studi/karir siswa dengan kategori baik. Bilamana konselor menghadapi masalah di luar keempat masalah di atas, konselor melakukan *referral* kepada ahli lain dengan tepat.

Kinerja konselor dalam mengunjukkerjakan dimensi-dimensi yang tergolong rendah dan cukup sebagaimana dikemukakan sebelumnya jarang dilakukan konselor di sekolah. Ini disebabkan para konselor banyak menghabiskan waktu dalam mengunjukkerjakan dimensi yang tergolong tinggi, ditambah lagi adanya tugas-tugas administratif yang secara insidental diberikan kepala sekolah. Selain itu, dimensi-dimensi konselor profesional ini dikembangkan secara umum dalam seting sekolah dan masyarakat, tidak secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan seting sekolah. Sehingga terdapat dimensi-dimensi kompetensi khusus yang lebih memungkinkan merespon atau menangani kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak dalam seting masyarakat, seperti dimensi KAR, KER, KMPK, KPPK, KSK.

Kinerja Konselor Berdasarkan Perbedaan Latar Pendidikan

Hasil data persentase kinerja konselor profesional yang berlatar pendidikan BK dan non BK serta dilihat keadaan masing-masing dimensi kompetensi dari kedua kelompok latar pendidikan tersebut. Secara keseluruhan, tingkat kinerja konselor dalam melaksanakan 15 dimensi kompetensi konselor yang berlatar pendidikan BK mencapai sebesar 70,13% (tinggi); dan tingkat kinerja konselor yang berlatar pendidikan non-BK sebesar 63,67% (cukup). Artinya konselor yang berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan ke-15 dimensi kompetensi dengan memu-

askan, sementara konselor yang bukan berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan ke-15 dimensi kompetensi berada pada taraf sedang. Perbedaan hasil ini mengandung arti pula bahwa latar pendidikan BK berperan memberi urunan bagi tingginya kinerja konselor profesional.

Secara spesifik, menurut masing-masing dimensi dari kedua kelompok konselor ini didapatkan hasil berikut. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam menampilkan dimensi CK dalam menjalankan fungsi dan peran konselingnya sebesar 75,53% (tinggi), sedangkan bagi konselor non-BK sebesar 70,67% (tinggi). Artinya para konselor baik yang berlatar pendidikan BK maupun yang berlatar pendidikan bukan BK sama-sama dapat mengunjukkerjakan ciri-ciri kepribadian berupa atribut-atribut atau sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh konselor profesional dengan memuaskan. Meskipun ada perbedaan jumlah persentase yang tipis. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam menampilkan KAR mencapai sebesar 73,65% (tinggi), sedangkan tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai 68,10% (sedang).

Perbedaan capaian persentase ini berarti bahwa konselor yang berlatar pendidikan BK lebih memuaskan dalam mengunjukkerjakan konseling bagi pemenuhan kebutuhan perkembangan unik anak dan remaja daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam menampilkan dimensi KK sebesar 68,59% (sedang), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK sebesar 63,00% (sedang). Artinya, kedua kelompok konselor ini mengunjukkerjakan kompetensi memahami, mengimplementasikan prinsip-prinsip kerja kelompok dalam seting sekolah sama-sama berada pada taraf sedang atau cukup memuaskan; Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KI mencapai sebesar 72,83% (tinggi), sementara konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama sebesar 68,31% (sedang). Artinya konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan strategi konseling individual dengan memuaskan lebih baik daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK pada taraf cukup memuaskan, sehingga lebih memberikan pengaruh fasilitatif terhadap kepedulian, pengembangan, dan perubahan tingkah laku klien. Tingkat kinerja konselor yang berlatar pendidikan BK dalam menampilkan dimensi KS mencapai sebesar 77,16% (tinggi), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 69,13% (sedang). Artinya konselor berlatar pendidikan BK dapat membangun komunikasi, memperkuat hubungan antara orang tua dan sekolah dengan memuaskan lebih baik daripada konselor

berlatar bukan BK hanya pada taraf cukup memuaskan. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KA mencapai sebesar 58.97% (rendah), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 46.67% (rendah). Hasil ini mengandung arti bahwa baik konselor berlatar pendidikan BK maupun konselor yang bukan berlatar pendidikan BK sama-sama kurang memuaskan mengunjukkerjakan kompetensi memahami dinamika kebergantungan obat dan mendiagnosis/menyembuhkan klien yang mengalami abuse/adiksi. Kurang memuaskannya kinerja dimensi ini karena selain konselor jarang menangani kasus-kasus kebergantungan obat, kultur sekolah memandang tabu kasus ini terjadi.

Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KPPK mencapai sebesar 63.62% (sedang), sementara konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 56.00% (rendah). Perbedaan hasil persentase ini mengandung arti bahwa konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan pemahaman terhadap dinamika keluarga dan memperkaya keterampilan orang tua, pola-pola keluarga dan hubungan pasangan cukup memuaskan lebih baik daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK dengan kurang memuaskan. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KMPK mencapai sebesar 62.18% (sedang), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 52.00% (rendah). Artinya, konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan kompetensi merespon kebutuhan klien dari populasi spesifik dan multikultural melalui intervensi yang efektif dengan cukup memuaskan lebih baik daripada kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK yang kurang memuaskan.

Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KPPB mencapai sebesar 73,40% (tinggi), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 68.83% (sedang). Perbedaan hasil penelitian ini mengandung arti bahwa konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan keterampilan menyusun program konseling perkembangan yang efektif dengan memuaskan lebih baik daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK hanya dengan cukup memuaskan. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KPKK mencapai sebesar 70.63% (tinggi), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 63.73% (cukup). Artinya konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan pemahaman terhadap dinamika keluarga dan memper-

kaya keterampilan orang tua, pola-pola keluarga dan hubungan pasangan dengan memuaskan lebih baik daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK berada pada taraf sedang.

Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam menampilkan dimensi Kko mencapai sebesar 71.10% (tinggi), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 65.45% (sedang). Ini berarti bahwa konselor mengunjukkerjakan kompetensi memahami model konsultasi dan memelihara hubungan kolaboratif di sekolah dengan memuaskan lebih baik daripada kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK berada pada taraf sedang. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KDDR mencapai sebesar 68.13% (sedang), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 59.36% (rendah). Artinya konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan kompetensi mendiagnosis, memahami, dan memelihara data klien berdasarkan dukungan asesmen dengan cukup memuaskan masih lebih baik daripada kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK pada taraf kurang memuaskan.

Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KSK mencapai sebesar 65.06% (sedang), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 59.00% (rendah). Perbedaan hasil persentase ini mengandung arti bahwa konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan kompetensi dalam aspek etik, legal, aturan dan profesi serta metode dalam mengelola kasus klien dengan cukup memuaskan masih lebih baik daripada kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK dengan kurang memuaskan.

Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KER mencapai sebesar 60.58% (sedang), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 52.50% (rendah). Artinya, konselor berlatar pendidikan BK mengunjukkerjakan konsep dan praksis riset dan evaluasi untuk kepentingan klien dengan cukup memuaskan lebih baik daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK berada pada taraf kurang memuaskan. Tingkat kinerja konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjukkerjakan dimensi KP mencapai sebesar 59.94% (rendah), sedangkan konselor berlatar pendidikan non-BK dalam dimensi yang sama mencapai sebesar 55.50% (rendah). Hasil ini memberikan makna bahwa kedua kelompok konselor sama-sama mengunjukkerjakan pemahaman masing-masing terhadap konsep dasar asesmen yang tepat dan komprehensif serta implikasinya bagi kepentingan klien dengan kurang memuaskan.

Dari hasil persentase di atas dapat dikelompokkan menjadi tingkat kinerja konselor profesional yang berlatar pendidikan BK mengunjujkerjakan 7 dimensi yang tergolong tinggi, yakni dimensi CK, KAR, KI, KS, KPPB, KPCK, 2 dimensi (KA, KP) tergolong rendah, 6 dimensi (KK, KPPK, KMPK, KDDR, KSK, KER) tergolong cukup. Sedangkan tingkat kinerja konselor profesional yang bukan berlatar pendidikan BK mengunjujkerjakan 1 dimensi saja (CK) tergolong tinggi, 7 dimensi (KA, KPPK, KMPK, KDDR, KSK, KER, KP) tergolong rendah, 7 dimensi (KAR, KK, KI, KS, KPPB, KPCK, Kko) tergolong cukup.

Dari perbedaan hasil tingkat kinerja konselor yang berlatar pendidikan BK dan yang bukan berlatar pendidikan BK berarti bahwa konselor dari latar pendidikan BK menunjukkan profesionalisme lebih tinggi dalam hal penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap konselor dalam melaksanakan BK dibandingkan dengan konselor yang bukan berlatar pendidikan BK. Semua tugas memiliki implikasi langsung bagi penguasaan pengetahuan dan sikap-sikap oleh pemangku profesi agar mampu melaksanakan tugas dengan benar. Hasil ini memberi makna bahwa tingkat penguasaan kompetensi konselor berlatar pendidikan BK dalam mengunjujkerjakan ke-15 komponen kompetensi lebih tinggi daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK. Ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kinerja konselor yang berlatar pendidikan BK tergolong tinggi pada tujuh dimensi konselor profesional, yaitu dimensi CK, KAR, KI, KS, KPPB, KPCK, Kko, sementara dimensi konselor yang diunjujkerjakan pada kategori tinggi oleh konselor yang bukan berlatar pendidikan BK hanya dimensi CK. Ini juga mengandung arti bahwa konselor berlatar pendidikan BK lebih banyak mengunjujkerjakan dimensi konselor daripada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK, yang hanya mengunjujkerjakan dimensi CK.

Pencapaian dimensi CK pada konselor yang bukan berlatar pendidikan BK ini mencapai sebesar 70,67%. Artinya, konselor yang bukan berlatar pendidikan BK juga mengunjujkerjakan atribut-atribut atau sifat-sifat kepribadian dalam membantu klien dengan memuaskan, meskipun capaian persentasenya berbeda tipis dengan batas maksimal kategori cukup. Secara personal, konselor berlatar pendidikan bukan BK memiliki karakteristik pribadi yang diharapkan. Hasil ini didasari oleh asumsi penelitian yang menyatakan bahwa tingkat penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap individu dalam melaksanakan BK dapat menunjukkan profesionalisme konselor. Semakin tinggi tingkat penguasaan kompetensi konselor, semakin profesional konselor menjalankan tu-

gasnya. Ini berarti pula bahwa latar pendidikan BK memberi urunan bagi tingkat profesionalitas konselor. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang relevan (Supriadi, 1990) bahwa sebagian orang tua (38%) belum meyakini signifikansi dan eksistensi BK karena alasan kurang profesionalnya guru pembimbing dalam menjalankan tugas. Orang tua dan siswa kurang merasakan, mengakui keberadaan dan manfaat BK di sekolah. Melalui studi pendahuluan, penulis menemukan sejumlah guru pembimbing yang menunjukkan perilaku kurang profesional antara lain seperti pemegang buku absensi siswa, guru piket bukan berlatar pendidikan BK (guru bidang studi yang diserahkan tanggung jawab melaksanakan BK), sarjana muda, dan bukan berlatar pendidikan BK. Perilaku nonprofesional tersebut harus diubah secara sistemik dan *sustainable* menjadi perilaku profesional. Depdiknas (2003:7) telah menegaskan bahwa suatu profesi yang bermartabat perlu didukung oleh (a) pelayanan yang tepat dan bermanfaat, (b) pelaksana yang bermandat, dan (c) pengakuan yang sehat dari berbagai pihak yang terkait. Ketiga hal tersebut akan menjamin tumbuh subur dan kokohnya identitas serta tingginya citra dan kemartabatan profesi yang dimaksud. Terkait pentingnya latar pendidikan ini, Depdiknas (2003:7) menambahkan, ...untuk suatu profesi diperlukan pendidikan prajabatan untuk memberikan modal dasar bagi (calon) tenaga profesi, serta pendidikan dalam jabatan... Ini mengandung arti bahwa latar pendidikan BK merupakan modal dasar konselor profesional yang siap dikembangkan melalui *in-service training* secara berkelanjutan (*never ending*) dalam menjalankan tugas profesinya.

Kinerja konselor profesional yang berlatar pendidikan bukan BK menampilkan capaian 63,67% antara batas cukup minimal dan batas rendah maksimal. Untuk meningkatkan capaian yang lebih tinggi dari pencapaian ini, kelompok konselor ini tidak cukup hanya mendapatkan pendidikan penataran, seminar, lokakarya yang dilaksanakan secara insidental dan tidak sistematis. Sehingga konselor ini tidak memiliki pengetahuan/kemampuan yang utuh untuk diunjujkerjakan dalam menjalankan tugas BK-nya. Lebih-lebih jika konselor kelompok ini kurang proaktif terlibat dalam berbagai *training* maka tingkat kinerja BK-nya akan lebih rendah lagi. Tetapi kelompok konselor ini membutuhkan konsultasi, supervisi, *mentoring* dan *workshop* yang intensif serta berkolaborasi dengan konselor senior

Sementara itu, konselor profesional yang berlatar pendidikan BK telah menguasai keilmuan, teknik, dan praktik BK yang dituangkan dari kurikulum secara sistematis dan berjenjang. Pada saat *pre-service training* di LPTK, calon konselor ini juga telah

melaksanakan praktik lapangan sebagai konselor di sekolah-sekolah secara tersupervisi dan intensif oleh dosen pembimbing PPL-nya. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Dikti Depdiknas (2003:7) bahwa ...untuk suatu profesi diperlukan pendidikan prajabatan untuk memberikan modal dasar bagi (calon) tenaga profesi, serta pendidikan dalam jabatan. Jadi, pendidikan prajabatan mutlak dimiliki oleh konselor, barulah kemudian diperkaya, dikembangkan, dipelihara melalui pendidikan dalam jabatan yang difasilitasi oleh penyelenggaraan BK yang memadai di sekolah. Dengan kata lain, untuk mendapatkan kinerja konselor yang sangat memuaskan, pendidikan dalam jabatan tidak dapat menggantikan pendidikan prajabatan BK, bahkan pendidikan prajabatan ini ditumbuhsuburkan dalam penyelenggaraan BK yang memadai/iklim sekolah yang kondusif di SMAN.

Kinerja Konselor Berdasarkan Iklim Sekolah

Hasil data persentase kinerja konselor profesional kelompok konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dan konselor yang bertugas di sekolah yang kurang memadai, serta dilihat pula keadaan masing-masing dimensi kompetensi dari kedua kelompok konselor tersebut. Secara umum, tingkat kinerja konselor profesional yang bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraan BK-nya memadai mencapai sebesar 70.14% (tinggi). Sedangkan konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai sebesar 64.55% (sedang). Perbedaan persentase ini berarti bahwa konselor yang bertugas di SMAN yang iklim sekolahnya sehat bagi BK mengunggulkan kompetensi konselor lebih memuaskan daripada konselor yang bertugas di sekolah yang iklim sekolahnya kurang sehat/suportif. Dengan kata lain, iklim sekolah yang suportif bagi BK ternyata memberikan urunan bagi pencapaian kinerja konselor yang tinggi.

Secara spesifik menurut masing-masing dimensi kompetensi konselor profesional, konselor yang bertugas di sekolah yang memadai penyelenggaraan BK-nya menampilkan dimensi CK sebesar 74.92% (tinggi), sedangkan konselor yang bertugas di sekolah kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 72.08% (tinggi). Artinya kedua kelompok konselor sama-sama dapat mengunggulkan ciri-ciri kepribadian berupa atribut-atribut atau sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh konselor profesional dengan memuaskan, meskipun ada perbedaan hasil yang tipis. Hasil tersebut diperoleh bukan saja oleh dukungan latar pendidikan BK, melainkan juga tingginya minat, sifat alami konselor yang menarik/menyenangkan siswa serta pengalaman kerja konselor yang lama. Tingkat kinerja kon-

selor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam menampilkan dimensi KAR sebesar 74.07% (tinggi), sedangkan yang bertugas di sekolah kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 68.36% (cukup). Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai mengunggulkan konseling bagi pemenuhan kebutuhan perkembangan unik anak dan remaja dengan memuaskan lebih baik daripada konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam menampilkan dimensi KK sebesar 70.63% (tinggi), sedangkan konselor bertugas di sekolah yang kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 61.30% (cukup). Artinya, konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang suportif bagi BK mengunggulkan kompetensi memahami, mengimplementasikan prinsip-prinsip kerja kelompok dalam setting sekolah dengan memuaskan, lebih baik daripada konselor yang bertugas dalam iklim sekolah yang kurang suportif bagi BK berada pada taraf sedang. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam menampilkan dimensi KI sebesar 74.95% (tinggi), sedangkan konselor yang bertugas di sekolah kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 66.38% (cukup). Ini berarti konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai mengunggulkan strategi konseling individual dengan memuaskan, lebih baik daripada kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KS sebesar 76.16% (tinggi), sedangkan yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai sebesar 71.44% (tinggi). Artinya kedua kelompok konselor mengunggulkan kemampuan membangun komunikasi, memperkuat hubungan antara orang tua dan sekolah dengan memuaskan, meskipun ada perbedaan hasil yang tipis.

Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KA sebesar 55.95% (rendah), sedangkan yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 52.01% (rendah). Artinya kinerja kedua kelompok konselor kurang memuaskan dalam mengunggulkan kompetensi memahami dinamika kebergantungan obat dan mendiagnosis/menyembuhkan klien yang mengalami *abuse*/adiksi. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KPPK sebesar

63.04% (cukup), sedangkan yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 57.76% (rendah). Hasil penelitian ini memberi makna bahwa konselor yang bertugas di sekolah beriklim suportif bagi BK mengunjukkan pemahaman terhadap dinamika keluarga dan memperkaya keterampilan orang tua, pola-pola keluarga dan hubungan pasangan dengan cukup memuaskan, sedangkan kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang kurang memadai mengunjukkan dimensi yang sama dengan kurang memuaskan. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KMPK sebesar 61.57 % (sedang), sedangkan konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai sebesar 54.14% (rendah). Hasil penelitian ini memberi makna bahwa konselor di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai mengunjukkan kompetensi merespon kebutuhan klien dari populasi spesifik dan multikultural melalui intervensi dengan cukup memuaskan masih lebih baik daripada konselor di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai dengan taraf kurang memuaskan. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KPPB sebesar 72.98% (tinggi), sedangkan konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai sebesar 69.97% (sedang). Hasil ini memberi makna bahwa konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai mengunjukkan keterampilan menyusun program konseling perkembangan dengan memuaskan masih lebih baik daripada konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai dengan cukup memuaskan. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KPKK sebesar 69.09% (sedang), sementara konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai sebesar 66,54% (sedang). Artinya kedua kelompok konselor sama-sama mengunjukkan penguasaan perkembangan manusia, teori perkembangan dan pilihan karir serta memiliki informasi diri klien maupun informasi karir yang lengkap dengan cukup memuaskan.

Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KKo sebesar 71.23% (tinggi), sementara yang bertugas di sekolah kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 66.07% (sedang). Hasil ini memberi makna bahwa konselor di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai mengunjukkan kompetensi memahami model konsultasi dan mem-

lihara hubungan kolaboratif di sekolah dengan memuaskan lebih baik daripada konselor di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai dengan cukup memuaskan. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KDDR sebesar 66.94% (sedang), sedangkan yang bertugas di sekolah kurang memadai penyelenggaraan BK-nya pada dimensi yang sama sebesar 62.01% (sedang). Artinya, kedua kelompok konselor sama-sama mengunjukkan kompetensi mendiagnosis, memahami, dan memelihara data klien berdasarkan dukungan asesmen dengan cukup memuaskan.

Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KSK sebesar 67.14% (sedang), sedangkan yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya kurang memadai pada dimensi yang sama sebesar 57.33% (rendah). Hasil ini memberi makna bahwa konselor di sekolah yang iklimnya suportif bagi BK mengunjukkan kompetensi dalam aspek etik, legal, aturan dan profesi serta metode dalam mengelola kasus klien dengan cukup memuaskan lebih baik daripada konselor yang bertugas di iklim sekolah yang kurang suportif bagi BK dengan kurang memuaskan.

Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya memadai dalam dimensi KER sebesar 60.48% (sedang), sedangkan yang bertugas di sekolah beriklim kurang suportif bagi BK pada dimensi yang sama sebesar 53.74% (rendah). Artinya konselor yang bertugas di sekolah beriklim suportif bagi BK mengunjukkan kemampuan menerapkan konsep dan praksis riset dan evaluasi untuk kepentingan klien dengan cukup memuaskan lebih baik daripada konselor di sekolah beriklim kurang suportif bagi BK dengan kurang memuaskan. Tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah beriklim suportif bagi BK pada dimensi KP sebesar 62.86% (sedang), sedangkan yang bertugas di sekolah beriklim kurang suportif bagi BK pada dimensi yang sama sebesar 52.59% (rendah). Hasil penelitian ini memberi makna bahwa konselor di sekolah beriklim suportif bagi BK mengunjukkan pemahamannya terhadap konsep dasar asesmen yang tepat dan komprehensif serta implikasinya bagi kepentingan klien dengan cukup memuaskan, lebih baik daripada konselor di sekolah beriklim kurang suportif bagi BK dengan kurang memuaskan.

Dari paparan hasil kinerja konselor berdasarkan iklim sekolah dapat dideskripsikan bahwa tingkat kinerja konselor profesional mengunjukkan dimensi CK,KAR,KK,KI,KS,KPPB, Kko pada taraf tinggi di sekolah yang iklim penyelenggaraan BK-nya

memadai, sedangkan tingkat kinerja konselor yang bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraannya BK-nya kurang memadai hanya 1 dimensi yang tinggi, yakni CK. Ada enam dimensi yang tergolong rendah diunjukkan oleh konselor yang bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraannya kurang memadai yaitu KA, KPPK, KMPK, KSK, KER, KP. Sedangkan konselor yang bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraannya BK-nya memadai mengunjukkan dimensi yang tergolong rendah, satu dimensi saja, yakni dimensi KA. Pencapaian tingkat kinerja yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya dukungan kepala sekolah baik moril maupun materil sehingga meskipun terdapat 14 konselor berlatar pendidikan BK bertugas di sekolah tersebut tidak cukup berarti meningkatkan kinerja dimensi konselor profesional. Temuan ini sejalan dengan pandangan teori yang dikemukakan Furqon dkk (2003) bahwa tingkat kinerja yang tinggi hanya dapat terwujud dengan optimal apabila didukung oleh lingkungan sistem sosial yang disebut dengan iklim sekolah. Uraian di atas memberikan makna bahwa kinerja yang memuaskan tersebut tidak dihasilkan di ruangan hampa, melainkan kinerja konselor memuaskan didapatkan melalui interaksi unik dalam sistem sosial yang berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama. Ini berarti juga bahwa kinerja dimensi konselor profesional tersebut diunjukkan dalam dimensi ruang dan waktu.

Kepedulian kepala sekolah seyogyanya diwujudkan nyata dalam bentuk dukungan konkret seperti ruangan, peralatan, sarana dan fasilitas BK serta supervisi program BK secara terjadwal dan berkelanjutan. Para guru berkolaborasi dengan konselor dalam menangani terciptanya suasana siswa termotivasi untuk belajar dan menguasai kompetensi. Persepsi siswa dan orang tua juga semakin positif terhadap BK. Mereka tidak memandang ruang BK sebagai tempat anak yang bermasalah, namun sebagai tempat untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri. Persepsi siswa ini seyogyanya perlu diubah dengan cara menampilkan layanan BK yang signifikan. Dengan adanya kondisi sistem sosial sekolah yang telah terbangun kondusif dan positif ini, mendukung tingkat kinerja konselor profesional. Dengan demikian, iklim sekolah memberikan urunan bagi tingginya tingkat kinerja konselor profesional.

Kinerja Konselor Berdasarkan Latar Pendidikan dan Iklim Sekolah

Hasil data persentase kinerja konselor profesional berdasarkan latar pendidikan dan iklim sekolah

tercantum pada Tabel 1. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja konselor profesional berdasarkan latar pendidikan BK dengan iklim sekolah memadai mencapai sebesar 72,89% (tinggi). Tingkat kinerja konselor profesional yang berlatar pendidikan BK dan bertugas di sekolah yang iklimnya kurang memadai mencapai sebesar 67,23% (cukup). Selanjutnya tingkat kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK dan bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraannya BK-nya memadai mencapai sebesar 66,48% (cukup). Kemudian tingkat kinerja yang bukan berlatar pendidikan BK dan bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraannya BK-nya kurang memadai mencapai sebesar 59,46% (rendah).

Tabel 1. Persentase Kinerja Konselor Profesional Berdasarkan Latar Pendidikan dan Iklim Sekolah

Aspek		Skor Aktual	Skor Ideal	%
Latar Pendidikan	Iklim Sekolah			
BK	Memadai	7347	10080	72.89
BK	Kurang memadai	6438	9576	67.23
Non BK	Memadai	5026	7560	66.48
Non BK	Kurang memadai	2997	5040	59.46

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1 dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan capaian secara konsisten ke empat kelompok konselor di atas. Perbedaan capaian itu terjadi karena pengaruh aspek latar pendidikan BK dan iklim sekolah yang kondusif bagi BK. Capaian ini sejalan dengan penelitian Furqon dkk (2003) bahwa kinerja konselor profesional setidaknya didukung oleh kompetensi, kondisi *environmental* dan kondisi kontekstual. Kompetensi diperoleh dari latar pendidikan BK dan kondisi *environmental* dan kondisi kontekstual difasilitasi oleh iklim sekolah. Seiring dengan hasil penelitian ini, Natawidjaja (1990) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa penerapan bimbingan oleh guru dalam proses belajar mengajar belum memuaskan. Penerapan bimbingan di sekolah terbukti masih berada pada taraf rutin. Penerimaan terhadap eksistensi BK di sekolah masih sebagai tugas formal dan para petugas bimbingan belum melibatkan diri secara utuh dalam memperbaiki kondisi. Petugas bimbingan meragukan apakah mereka mampu menjalankan peran sebagai petugas bimbingan. Demikian pula yang terjadi terhadap para siswa sebagai akibat kinerja konselor/petugas bimbingan, masih menunjukkan sikap kurang positif dan masih

enggan memanfaatkan pelayanan BK di sekolahnya. Kartadinata (2005) memerinci hasil penelitiannya di SMA se-Jawa Barat memperkuat hasil penelitian ini bahwa mutu bimbingan masih perlu ditingkatkan. Aspek program bimbingan, ketenagaan, prosedur dan teknik, isi bimbingan serta daya dukung lingkungan termasuk manajemen, pembinaan profesional dan sarana prasarana merupakan aspek-aspek yang memerlukan penataan secara sistemik dan sistematis. Makna hasil penelitian sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan makna hasil ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa kinerja konselor profesional diuruni oleh latar belakang pendidikan dan iklim sekolah. Secara lebih tegas, kinerja konselor yang sangat memuaskan secara signifikan diuruni oleh latar pendidikan BK dan iklim sekolah yang kondusif bagi BK.

Jika ke-4 kelompok konselor sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dibandingkan tampak bahwa tingkat kinerja konselor profesional tertinggi (72,89%) adalah kinerja konselor yang berlatar pendidikan BK dan iklim sekolah yang memadai. Tingkat kinerja konselor terendah (59,46%) adalah kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK dan iklim sekolah yang kurang memadai. Hasil perbedaan yang menyolok dua kelompok tersebut memberikan informasi lebih terinci bahwa latar pendidikan BK dan iklim sekolah yang memadai/suportif memberikan urunan bagi tingginya tingkat kinerja konselor profesional.

Selain itu, bila dibandingkan antara kinerja kelompok konselor berlatar pendidikan BK yang bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraan BK-nya kurang memadai (67,23%) dan kinerja kelompok konselor yang bukan berlatar pendidikan BK bertugas di sekolah yang iklimnya memadai (66,48%) tampak pula bahwa latar pendidikan BK lebih kuat memberikan urunan bagi tingginya tingkat kinerja konselor profesional daripada iklim sekolah. Artinya, konselor berlatar pendidikan BK memiliki pemahaman, penguasaan tentang apa yang seharusnya dilakukan melalui program BK yang didesain untuk diunjukkerjakan, meskipun kelompok konselor ini banyak menghadapi tantangan kondisi sekolah yang kurang memadai. Kelompok konselor ini masih dapat mengunjukkerjakan kompetensi konselor seadanya. Berbeda halnya dengan konselor yang bukan berlatar pendidikan BK, walaupun bertugas di sekolah yang iklim penyelenggaraan BK-nya memadai, dipastikan tidak dapat berbuat sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena konselor kelompok ini tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mumpuni yang diharapkan untuk mengunjukkerjakan kompetensi konselor.

Makna dan esensi temuan di atas adalah bahwa kesejahteraan psikologis klien/siswa sangat dipengaruhi oleh tingginya kualitas kinerja konselor profesional. Tingginya kualitas kinerja konselor profesional hanya bisa diperoleh dengan adanya konselor berlatar pendidikan BK dan iklim sekolah yang suportif terhadap kinerja BK. Dengan kata lain, latar pendidikan BK dan iklim sekolah yang suportif bagi BK menjadi prasyarat mutlak bagi tingginya kinerja konselor di sekolah. Kesadaran akan pentingnya kualitas kompetensi dalam diri konselor tidak hanya dengan mengembangkan segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, melainkan seyogyanya dilandasi oleh dan diintegrasikan dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Berkualitasnya kinerja konselor secara esensial dimulai dari evaluasi diri (*self-evaluation*) konselor. Hasil evaluasi diri ini membawa implikasi pada pentingnya pendidikan konselor dan iklim sekolah yang suportif bagi BK untuk dituangkan dalam program nyata bagi pihak yang berkompeten.

SIMPULAN

Tingkat kinerja konselor profesional yang dicapai para konselor saat ini secara empirik berada pada tingkat sedang, meskipun tingkat kinerja konselor profesional yang ditampilkan konselor bila dilihat dari tiap-tiap dimensi terbukti sangat variatif. Selain itu, latar pendidikan BK memberikan urunan pada pencapaian tingkat kinerja konselor profesional yang tinggi. Kesimpulan ini didasarkan pada dua temuan penelitian yang menyatakan bahwa *pertama*, tingkat kinerja konselor profesional yang berlatar pendidikan BK mencapai pada taraf tinggi, sedangkan tingkat kinerja konselor yang bukan berlatar pendidikan BK hanya berada pada taraf sedang, dan *kedua*, tingkat kinerja konselor profesional di sekolah beriklim suportif bagi BK mencapai pada taraf tinggi, sedangkan tingkat kinerja konselor profesional di sekolah beriklim kurang suportif bagi BK mencapai pada taraf sedang.

Dinamika hasil penelitian yang terjadi pada pencapaian persentase tingkat kinerja nyata dari yang tertinggi hingga terendah atau sebaliknya dari yang terendah hingga tertinggi memperkuat dukungan bahwa latar belakang pendidikan dan iklim sekolah memberikan urunan bagi pencapaian tingkat kinerja konselor profesional. Singkatnya, penelitian ini menemukan bahwa kinerja konselor profesional diuruni oleh latar pendidikan BK dan iklim sekolah yang suportif bagi BK.

DAFTAR RUJUKAN

- ABKIN. 2005. *Standar Kompetensi Konselor Indonesia*. Analisa, 3 April, 2005. *Sebanyak 73,4% Pengguna Narkoba di Sumatera Utara adalah Usia Sekolah*, hlm.3.
- Asrori, M. 1990. *Unjuk Kerja Petugas Bimbingan Ditelaah Dari Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Bowers, J.J. & Hatch, P.A. 2002. *The National Model for School Counseling Programs*. (Online), (<http://www.Schoolcounselor.Org.html>, diakses 17 November 2002).
- Canadian Standards and Guidelines for Career Development, 2001. *Core Competencies*, Ontario, ATEC for the National Steering Committee for Career Development Guidelines and Standards.
- Dahlan, M.D. 1988. *Posisi Bimbingan dan Penyuluhan dalam Pendidikan dalam Kerangka Ilmu Pendidikan*. Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di IKIP Bandung.
- Depdiknas. 2003. *Dasar Standardisasi Profesi Konseling*. Jakarta: Depdiknas.
- Engels, D.W. & Dameron, J.D. 1990. *The Professional Counselor: Competencies, Performance Guidelines and Assesment*. 2nd. Ed. Texas: American Association for Counseling and Development.
- Furqon, dkk. 2003, *Peningkatan Kinerja Profesional Guru Pembimbing Melalui Penelitian Tindakan Kolaboratif Guru-Dosen*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Bandung: PPB FIP UPI.
- Hatip, M. 1989. *Profil Konselor Sekolah Menengah Atas*. Tesis, Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung
- Kartadinata, S. 2005. *Arah dan Tantangan BK Profesional: Proposisi Historik-Futuristik: Tema Perspektif Baru Profesi Konseling di Era Global*. Makalah disajikan dalam Seminar di FIP & PPS UPI.
- Kartadinata, S. 2010. *Isu-isu Pendidikan: Antara Harapan dan Kenyataan*. Bandung: UPI Press.
- Murad, A. 2005. *Standar Kualitas Kompetensi Konselor Profesional*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPS UPI Bandung.
- Muri, Y. A. 1995. *Program Pengembangan Profesionalitas Petugas Bimbingan Sekolah*. Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: PPS UPI Bandung.
- Natawidjaja, R. 1990. *Fungsi dan Profesionalisasi BK dalam Pendidikan*. Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Pendidikan pada FIP IKIP Bandung. Tanggal 18 Oktober 1990.
- Supriadi, D. 1990. *Profesi dan Profesionalitas Konseling*. Makalah disajikan pada Seminar Konseling, PPS IKIP Bandung.
- Waspada. 11 Juni, 2010. *34,58 % Siswa SMA di Sergai Pengonsumsi Rokok Aktif*, hlm. 4.